

IMPLEMENTASI MANAJEMEN ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMA NEGERI 12 SEMARANG

Oleh:

Lilis Istiana¹

Putri Nur Arindah²

Azahratul Firdaussiyah³

Universitas Negeri Semarang

Alamat: JL. Sekaran, Kec. Gn. Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah (50229).

Korespondensi Penulis: lilisistiana@students.unnes.ac.id,
putrinurarindah26@students.unnes.ac.id, azahfirda9@students.unnes.ac.id.

Abstract. *Nationally, the cost of education in Indonesia is relatively high, yet the quality of education remains inadequate. The use of education funds will not be effective in achieving goals if not managed in accordance with applicable regulations. This study aims to examine the planning, implementation, and evaluation of school financing in improving educational quality at SMA Negeri 12 Semarang. The research method employed is descriptive with a case study approach. The research subjects include the BOP treasurer and students. Data were collected through in-depth interviews and documentation, and analyzed using triangulation techniques, including data collection, reduction, display, and conclusion drawing. The findings reveal: (1) Financial planning includes budget allocation for teacher training, school facility maintenance, student academic and non-academic activities, and character development programs. (2) Implementation of education financing is sourced from BOS and BOP funds, managed through the RKAS based on the number of students. Funds are allocated for teacher training, facility improvement, and student activities without imposing additional costs. (3) Financial evaluation is conducted through internal and external audits, regular reporting, document verification, and accountability meetings. All expenditures must be supported by physical evidence. The evaluation results are used to improve financial policies and enhance the quality of education.*

Received May 16, 2024; Revised May 27, 2025; May 31, 2025

*Corresponding author: lilisistiana@students.unnes.ac.id

IMPLEMENTASI MANAJEMEN ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMA NEGERI 12 SEMARANG

Keywords: Education Financing, School Quality, Planning and Evaluation, BOP & BOS Funds.

Abstrak. Secara nasional, biaya pendidikan di Indonesia tergolong tinggi, tetapi mutu pendidikannya masih belum memadai. Penggunaan dana pendidikan tidak akan efektif dalam mencapai tujuan apabila pengelolaannya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembiayaan dalam meningkatkan mutu sekolah di SMA Negeri 12 Semarang. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan jenis studi kasus. Objek penelitian yaitu bendahara BOP dan siswa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, serta dianalisis dengan teknik triangulasi yang mencakup pengumpulan, reduksi, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perencanaan pembiayaan meliputi alokasi biaya untuk pelatihan guru, pemeliharaan fasilitas sekolah, kegiatan akademik dan non akademik siswa, dan program pengembangan karakter. 2) Pelaksanaan Pembiayaan pendidikan berasal dari BOS dan BOP yang dikelola melalui RKAS berdasarkan jumlah siswa. Dana dialokasikan untuk pelatihan guru, peningkatan fasilitas, dan kegiatan siswa tanpa membebani biaya. 3) Evaluasi pembiayaan dilakukan melalui audit internal dan eksternal, laporan berkala, verifikasi dokumen, dan rapat pertanggungjawaban. Semua pengeluaran wajib didukung bukti fisik. Hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan kebijakan keuangan dan peningkatan mutu pendidikan.

Kata Kunci: Pembiayaan Pendidikan, Mutu Sekolah, Perencanaan dan Evaluasi, Dana BOP & BOS.

LATAR BELAKANG

Melalui penerapan manajemen pembiayaan yang baik, sekolah dapat secara sistematis merancang kebutuhan dana untuk mendukung berbagai aktivitas pendidikan. Proses ini mencakup upaya perencanaan yang matang, optimalisasi sumber dana melalui strategi penggandaan atau diversifikasi, pencatatan keuangan secara transparan, serta penggunaan anggaran yang diarahkan pada pencapaian program kerja secara maksimal dan hemat biaya. Dalam konteks ini, manajemen pembiayaan memiliki tiga tujuan utama: pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana sekolah agar setiap

pengeluaran memberikan dampak optimal terhadap kualitas pendidikan; kedua, memperkuat akuntabilitas dan transparansi keuangan, yang berarti bahwa setiap transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik; dan ketiga, meminimalisasi potensi penyimpangan anggaran atau praktik korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan (Indrawati et al., 2019). Dengan demikian, manajemen pembiayaan bukan hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang profesional dan berintegritas.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, diperlukan kreativitas dan inisiatif dari pihak sekolah dalam menggali serta memanfaatkan berbagai potensi sumber pendanaan, baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Selain itu, sangat penting untuk menempatkan bendaharawan atau pengelola keuangan yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi serta memahami sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perspektif prinsip keuangan pendidikan, pengelolaan anggaran harus berpedoman pada asas keadilan, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 48. Prinsip efektivitas khususnya perlu menjadi perhatian utama, yakni bagaimana setiap dana yang dikeluarkan benar-benar memberi kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pendidikan (Supriadi & Pratiwi, 2024). Maka dari itu, manajemen pembiayaan sekolah bukan hanya soal teknis pengeluaran dan pemasukan dana, tetapi juga merupakan wujud nyata dari komitmen institusi pendidikan dalam menjalankan fungsi sosial dan moralnya secara bertanggung jawab.

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen terhadap pendidikan dengan mengalokasikan minimal 20% APBN setiap tahun, sementara pemerintah daerah turut mendukung melalui anggaran untuk pembiayaan guru dan operasional sekolah. Di tingkat satuan pendidikan, penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) menjadi instrumen penting dalam merancang strategi keuangan tahunan. (Sofyan et al., 2021) menekankan bahwa RAPBS harus selaras dengan visi sekolah dan disertai pertanggungjawaban yang transparan. Sementara itu, (Imanika et al., 2024) menambahkan bahwa RAPBS yang disusun secara partisipatif mampu mengakomodasi kebutuhan strategis sekolah dan mendukung pengembangan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMA NEGERI 12 SEMARANG

Penyusunan RAPBS memiliki peran penting dalam memetakan kebutuhan sekolah serta mengontrol efektivitas pengeluaran agar tetap sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan perencanaan yang baik, sekolah dapat menjalankan kegiatan operasional secara terencana dan terukur. (Suryaman & Trisnawati, 2025) menyatakan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif harus berbasis pada dokumen perencanaan seperti RKJM dan RKAS, serta melibatkan seluruh unsur sekolah guna memastikan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan dana. Selain itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif tidak hanya mendukung kegiatan akademik, tetapi juga mencakup peningkatan sarana prasarana, pelatihan tenaga pendidik, dan penyediaan bahan ajar (Na'im, 2023). Oleh karena itu, manajemen pembiayaan yang efisien dan transparan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan memastikan akses pendidikan yang merata.

Dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan, kualitas sebuah sekolah dapat dilihat dari proses pembelajarannya, dimana peran guru sangat menentukan keberhasilan upaya tersebut. Namun, fakta menunjukkan bahwa kualitas tenaga pendidik di Indonesia hingga saat ini masih tergolong rendah. Banyak guru yang belum menguasai materi pembelajaran secara memadai (Kadariah et al., 2020), mengalami keterbatasan dalam penerapan strategi pengajaran di kelas, serta kurang percaya diri dalam membimbing siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (Mufid et al., 2025). Kondisi ini menjadi tantang serius yang harus diatasi guna meningkatkan pembelajaran dan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka putus sekolah di jenjang SMA selama 2022-2023 mencapai total 44,13%. Pada tahun 2022, persentase siswa yang putus sekolah sebesar 22,52%, dan mengalami penurunan menjadi 21,61% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya mempertahankan siswa, walaupun tantangan dalam mengurangi angka putus sekolah masih perlu perhatian serius. Berikut disajikan diagram angka putus sekolah tahun 2022-2023.

Gambar 1. Jumlah siswa putus sekolah di Indonesia tahun 2022-2023



Sumber: BPS, 2022

Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan di sektor pendidikan, termasuk tingginya angka putus sekolah, pemerintah terus meningkatkan alokasi anggaran pendidikan secara bertahap setiap tahunnya. Hal ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki mutu dan pemerataan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran pendidikan tahun 2024 mencapai Rp660,8 triliun, yang terbagi atas Rp237,3 triliun dari belanja pemerintah pusat, Rp346,6 triliun melalui transfer ke daerah, dan Rp77 triliun untuk pembiayaan investasi. Alokasi dana tersebut mencerminkan strategi pemerintah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pembelajaran di semua jenjang pendidikan. Berikut disajikan diagram yang menggambarkan distribusi anggaran pendidikan dalam APBN menurut data (Kemenkeu, 2023).

Gambar 2. Anggaran pendidikan dan APBN tahun 2020-2024



Sumber: Kemenkeu RI, 2023

IMPLEMENTASI MANAJEMEN ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMA NEGERI 12 SEMARANG

Berdasarkan data biaya pendidikan yang ditampilkan dalam bentuk diagram, dapat disimpulkan bahwa secara nasional, biaya pendidikan di Indonesia tergolong tinggi, namun mutu pendidikannya masih belum sebanding. (Arnita Niroha Halawa & Dety Mulyanti, 2023) menyatakan bahwa mutu sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti kepemimpinan yang efektif, pengembangan bahan ajar, strategi pembelajaran, media, sistem penilaian, evaluasi, dan kurikulum. Pada level satuan pendidikan, sumber pembiayaan berasal dari subsidi pemerintah pusat dan daerah, iuran siswa, serta sumbangan masyarakat. Namun, sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SMP) tidak diperbolehkan menarik pungutan dari orang tua siswa untuk kebutuhan operasional sekolah. Saat ini, seluruh biaya pendidikan di tingkat tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin pembiayaan operasional sekolah secara menyeluruh, tanpa membebani orang tua, guna mendukung pemerataan kualitas pendidikan.

Biaya dan mutu pendidikan memiliki keterkaitan langsung dalam mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, mulai dari jenjang PAUD/TK hingga pendidikan menengah. Pada tingkat satuan pendidikan, pembiayaan diperoleh dari berbagai sumber seperti subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, serta sumbangan dari masyarakat. Namun, khusus untuk sekolah negeri pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama (SMP), tidak diperkenankan melakukan pungutan biaya kepada orang tua siswa guna memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Kebijakan ini diterapkan karena seluruh kebutuhan pembiayaan telah menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga orang tua siswa tidak dibebani biaya pendidikan. Faktor ini menjadi dasar penting dalam kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia yang bertujuan menjamin akses pendidikan yang merata dan berkeadilan.

SMA Negeri 12 Semarang merupakan contoh sekolah yang menyediakan pendidikan tanpa biaya bagi semua siswa. Kebijakan ini tidak hanya membantu siswa dari keluarga kurang mampu, tetapi juga memastikan semua siswa dapat mengakses pendidikan yang setara. Dengan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah, sekolah ini dapat menjalankan operasionalnya tanpa membebani biaya tambahan kepada orang tua siswa. Hal ini membantu menciptakan pemerataan pendidikan dan mengurangi kesenjangan akses di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bendahara BOP di SMA Negeri 12 Semarang, tidak ditemukan permasalahan terkait pengelolaan dana operasional. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan di sekolah berjalan dengan baik dan transparan. Selain itu, data mengenai jumlah pendaftaran siswa selama dua tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif stabil. Pada tahun pelajaran 2023 hingga 2024, jumlah pendaftar tercatat sebanyak 432 siswa, mengalami stagnasi tanpa peningkatan maupun penurunan signifikan. Kondisi ini mengindikasikan kestabilan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan di SMA Negeri 12 Semarang. Namun, stagnasi tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk merancang strategi guna meningkatkan daya tarik sekolah dalam menghadapi persaingan dengan institusi pendidikan lain di wilayah tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui bahwa jumlah peserta didik di SMA Negeri 12 Semarang selama kurun waktu dua tahun ajaran di mulai tahun 2023 sampai 2024 sudah memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB). Hasil observasi awal terhadap sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 12 Semarang menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan bangunan fisik terlihat bagus.

Tabel 1. Sarana dan prasarana di SMA Negeri 12 Semarang

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Ruang Kelas	36	✓	
2	Laboratorium Biologi	1	✓	
3	Laboratorium Kimia	1	✓	
4	Laboratorium Fisika	1	✓	
5	Laboratorium Komputer	1	✓	
6	Ruang Musik & Studio	1	✓	
7	Ruang Serbaguna	1	✓	
8	Ruang Guru	6	✓	
9	Ruang Tata Usaha	1	✓	
10	Ruang Kepala Sekolah	1	✓	
11	Ruang Wakil Kepala Sekolah		✓	

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN ANGGARAN PENDIDIKAN
DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMA NEGERI
12 SEMARANG**

12	Ruang OSIS & MPK	1	✓	
13	Ruang APR	1	✓	
14	Ruang Bimbingan Konseling	1	✓	
15	Ruang Koperasi	1	✓	
16	Ruang UKS	1	✓	
17	Ruang Kerohanian	1	✓	
18	Mushola	1	✓	
19	Perpustakaan	1	✓	
20	Lapangan Serbaguna	1	✓	
21	Lahan Parkir	1	✓	
22	Taman	1	✓	
23	<i>Green House</i>	1	✓	
24	Kantin	6	✓	
25	Toilet Siswa	12	✓	
26	Toilet Guru	5	✓	
27	Toilet Staff & Karyawan	1	✓	
28	Pos Jaga	1	✓	
29	CCTV	10	✓	
Jumlah		97		

Sumber: Wawancara (25 april 2025)

SMA Negeri 12 Semarang berhasil menunjukkan tata kelola manajemen yang efektif, sehingga mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber dana dan sumber daya yang ada ke dalam sektor-sektor yang tepat. Hal ini ditunjukkan dengan pemenuhan prinsip-prinsip manajemen pembiayaan pendidikan, khususnya dalam meningkatkan mutu akademik. Faktor ini menjadi alasan peneliti melakukan penelitian, yaitu karena sekolah ini telah menunjukkan praktik manajemen pembiayaan pendidikan yang efektif dan terstruktur dalam upaya peningkatan mutu sekolah. Selain itu, adanya sistem yang memastikan terpenuhinya standar dengan menetapkan SOP (Standar Operasional Pelaksanaan) dalam pengelolaan pembiayaan dan pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara terbuka dan transparan, serta diiringi dengan kemungkinan adanya pengaduan dari masyarakat, juga menjadi pertimbangan penting.

Peneliti melakukan *research gap* untuk melihat adanya kesenjangan di dalam penelitian terdahulu yang menjadi kekurangan penelitian. Pertama, penelitian dengan judul “Manajemn Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Mts Ummul Quro Al-Islami Bogor” yang dilakukan oleh (Muchamad Zainal Muttaqin et al., 2023), *research gap* di dalam penelitian ini terletak pada manajemen pembiayaan pendidikan di MTs Ummul Quro Al-Islami berfokus pada tahapan perencanaan hingga pelaporan, serta penerapan transparansi anggaran. Tetapi, penelitian ini belum menjangkau terkait konteks sekolah negeri di tingkat SMA, khususnya terkait bagaimana alokasi anggaran mendukung peningkatan mutu akademi dan non akademik secara langsung. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji praktik pengelolaan pembiayaan di SMA Negeri 12 Semarang yang berbasis RKAS, serta menekankan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam meningkatkan mutu sekolah. Kedua pada penelitian dengan judul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Sekolah SD Negeri Klepu 03 Pringapus Kabupaten Semarang” yang dilakukan oleh (Mufid et al., 2025), *research gap* di dalam penelitian ini terletak pada manajemen pembiayaan pada jenjang SD berbasis dana BOS. Namun, belum mencakup konteks SMA negeri yang lebih kompleks, karena melibatkan BOS dan BOP serta mekanisme audit dan RKAS. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji manajemen pembiayaan di SMA Negeri 12 Semarang untuk melihat dampaknya terhadap mutu guru, fasilitas, dan prestasi siswa.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis dampak manajemen anggaran pendidikan terhadap peningkatan mutu sekolah, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap guru, fasilitas, dan prestasi siswa. Secara khusus, penelitian ini ingin mengungkap bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran dilakukan di sekolah, serta sejauh mana pengelolaan anggaran tersebut mampu mendorong peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas pembelajaran yang memadai, dan pencapaian hasil belajar siswa. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh tentang peran strategis manajemen anggaran dalam menciptakan lingkungan sekolah yang berkualitas dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMA NEGERI 12 SEMARANG

KAJIAN TEORITIS

Teori Manajemen Keuangan Publik

Teori manajemen keuangan publik fokus pada bagaimana pemerintah mengelola sumber daya keuangannya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, termasuk dalam sektor pendidikan. Dalam konteks pendidikan, teori ini menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan sekolah agar dapat meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Menurut penelitian (Triwiyanto & Kusumaningrum, 2024) sistem manajemen keuangan pendidikan yang baik meliputi perencanaan anggaran yang matang, pengelolaan dana yang transparan, serta pelaporan dan tanggung jawab yang akuntabel. Hal ini penting agar dana yang tersedia dapat dialokasikan secara optimal untuk kebutuhan pembelajaran, fasilitas, dan pengembangan guru sehingga berdampak positif pada mutu pendidikan.

Selain itu, teori ini juga mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan publik yang efisien dapat meminimalkan pemborosan anggaran dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana, hal yang sangat penting terutama dalam sektor pendidikan yang memiliki keterbatasan sumber daya. Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, pemerintah daerah dan sekolah dapat menyediakan layanan pendidikan berkualitas yang pada akhirnya meningkatkan partisipasi belajar siswa dan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Manajemen Anggaran

Manajemen anggaran merupakan proses strategis yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana dalam organisasi pendidikan. Menurut (Mardiasmo, 2019), sistem ini bertujuan mengendalikan sumber daya keuangan agar pencapaian tujuan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dalam konteks pendidikan, pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya mendukung stabilitas administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. (Fatma Sari et al., 2024) dan (Eminarni et al., 2025) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana memiliki dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Penerapan manajemen anggaran yang baik meliputi perencanaan partisipatif, pengendalian ketat, dan evaluasi berkelanjutan. Keterlibatan pemangku kepentingan penting untuk efisiensi (Ramdhansyah & Karo-karo, 2024), sedangkan kurangnya partisipasi guru dalam penyusunan RKAS dapat menghambat pencairan dana dan pelaksanaan program (Nurhattati & Ripki, 2021). Evaluasi yang transparan dan akuntabel meningkatkan efisiensi dan kepercayaan stakeholder serta mendukung perbaikan berkelanjutan (Eminarni et al., 2025) dan (Fatma Sari et al., 2024). Dengan demikian, manajemen anggaran yang efektif dan partisipatif sangat berperan dalam peningkatan mutu sekolah.

Dana BOS

Dana BOS merupakan sumber utama pembiayaan bagi sekolah dasar dan menengah untuk memenuhi kebutuhan nonpersonalia serta kegiatan lain sesuai ketentuan (Sjioen & Ludji, 2020). Dana ini diberikan kepada sekolah negeri dan swasta untuk membiayai operasional seperti gaji guru dan tenaga kependidikan non-PNS, pengadaan alat tulis, serta pemeliharaan sarana sekolah. Pencairannya dilakukan oleh bendahara sekolah setelah mendapat persetujuan kepala sekolah, dengan tetap memperhatikan saldo minimum sesuai peraturan (Refnawati et al., 2024).

Pengelolaan dana BOS mengacu pada Permendagri No. 62 Tahun 2011 yang mencakup mekanisme penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban guna menciptakan tata kelola yang tertib dan berlandaskan prinsip good governance. Dalam praktiknya, pengelolaan harus transparan dan akuntabel (Rahayuningsih, 2020). Berdasarkan Permendikbud No. 8 Tahun 2020, alokasi dana BOS Reguler ditentukan dari hasil perkalian jumlah peserta didik dengan satuan biaya per jenjang: SD Rp900.000, SMP Rp1.100.000, SMA Rp1.500.000, SMK Rp1.600.000, dan sekolah luar biasa Rp2.000.000 per siswa per tahun, berdasarkan data NISN dalam sistem Dapodik.

Dana BOP

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) adalah program pendanaan dari pemerintah daerah untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB guna mendukung kelancaran operasional dan peningkatan mutu pendidikan (Lukmonowati et al., 2024). Dana ini digunakan untuk keperluan seperti pengadaan alat pembelajaran serta pembayaran guru

IMPLEMENTASI MANAJEMEN ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMA NEGERI 12 SEMARANG

tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Penelitian oleh (Rakhma, 2022) menunjukkan bahwa BOP berdampak positif terhadap mutu sekolah, termasuk peningkatan prestasi belajar siswa.

Sebagai pendanaan pelengkap dari pemerintah pusat, pemerintah daerah wajib mengalokasikan BOP sebesar 20% dari anggaran sesuai amanat Undang-Undang (Munawwarah & Zubaidah, 2025). Dana ini mencakup seluruh jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK, dan harus dianggarkan setiap tahun melalui APBD provinsi atau kabupaten/kota.

Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan merupakan sebuah tolak ukur keberhasilan sistem pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga mampu berkontribusi secara sosial dan profesional. Mutu ini mencakup kualitas input, seperti guru dan sarana prasarana, proses pembelajaran yang aktif, hingga outputnya berupa kompetensi lulusan yang relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Menurut penelitian (Machali, 2022) untuk menjamin mutu tersebut, penerapan manajemen mutu seperti ISO sangat penting untuk mengatur tahapan pendidikan secara terstruktur dan berkelanjutan. Menurut (Sumiati & Ahmad, 2021) selain itu, pengendalian mutu melalui evaluasi input, proses, dan output perlu dilakukan secara sistematis guna mendeteksi kekurangan sejak dini dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Menurut penelitian (Mafazi & Ahmad, 2024), budaya mutu dalam lembaga pendidikan, seperti keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan dan penerapan manajemen berbasis sekolah, juga berperan penting dalam menciptakan layanan pendidikan yang bermutu.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks, makna, dan dinamika suatu fenomena, tanpa membatasi diri pada data berupa angka. Sesuai dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan serta memperoleh data mengenai manajemen pembiayaan pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah di SMA Negeri 12 Kota Semarang.

Penelitian ini bertempat di SMA Negeri 12 Kota Semarang. Subyek penelitian ini adalah perwakilan penyelenggara pendidikan di SMA Negeri 12 Kota Semarang yakni Bendahara sekolah dan siswa. Teknik pengumpulan data melalui wawancara terbuka. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah menganalisis data terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, sehingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan (*Budgeting*) dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SMA Negeri 12 Semarang

Hasil penelian menunjukkan bahwa perencanaan pembiayaan di SMA Negeri 12 Semarang, dilakukan pada setiap bulan mei sebagai persiapan awal menjelang tahun anggaran berikutnya. Dalam proses ini melibatkan unsur manajemen sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekola, para koordinator bidang, tenaga pendidikan, dan orang tua siswa melalui rapat dan hasil kesepakatan tertulis dalam RKAS.

Dalam wawancara dengan peneliti bendahara BOP SMA Negeri 12 Semarang sebagai berikut: “SMA Negeri 12 Semarang, melakukan perencanaan pembiayaan setiap tahunnya di awal menjelang tahun anggaran berikutnya, dengan komponen yang terlibat yaitu kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para koordinator bidang, tanaga pendidikan, dan orang tua siswa “.Proses perencanaan diawali dengan mencatat kebutuhan dari masing-masing bidang, baik itu kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, maupun humas. Lalu setelah melakukan pencatatan selanjutnya yaitu mendiskusikan dalam rapat koordinasi yang diikuti oleh pihak-pihak terkait untuk mengumpulkan usulan-usulan kegiatan. Setelah datanya sudah terkumpul semua tim keuangan menyusun RKAS, yang kemudian diajukan ke cabang dinas untuk di verifikasi dan pengesahaan.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa RKAS yang dimiliki SMA Negeri 12 Semarang merupakan rencana dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci

IMPLEMENTASI MANAJEMEN ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMA NEGERI 12 SEMARANG

untuk satu tahun anggaran, termasuk didalamnya alokasi biaya pengembangan atau peningkatan mutu sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap keadaan alokasi biaya dalam meningkatkan mutu sekolah di SMA Negeri 12 Semarang menunjukkan bahwa sekolah sudah melakukan alokasi biaya untuk peningkatan mutu sekolah. Pengalokasian biaya peningkatan mutu sekolah tersebut terjadi karna adanya Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan Dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang didalamnya memuat pelatihan guru, pemeliharaan fasilitas sekolah, mendukung kegiatan akademik dan non akademik siswa seperti olimpiade sains, pelatihan OSN, kegiatan ekstrakurikuler, lomba seni dan olah raga, serta program pengembangan karakter melalui LDK dan P5. Dalam melakukan pengalokasian biaya peningkatan mutu sekolah, SMA Negeri 12 Semarang sudah menyesuaikan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan mempertimbangkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan (*Accounting*) dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SMA Negeri 12 Semarang

Hasil penelitian pelaksanaan pembiayaan pendidikan menunjukkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 12 Semarang berasal dari dua komponen utama, yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Penjabaran tersebut menggambarkan bahwa sekolah telah mengelola dana dari dua sumber berbeda dengan peruntukan yang ditetapkan berdasarkan regulasi nasional dan daerah. Sebagaimana disampaikan oleh pihak sekolah, total jumlah siswa SMA Negeri 12 Semarang adalah lebih dari 1.258 siswa, dan penghitungan besar dana BOS serta BOP dilakukan berdasarkan jumlah siswa secara proporsional, sesuai ketentuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Mengenai mekanisme penyaluran dana, disebutkan bahwa BOS disalurkan dua kali dalam setahun, sedangkan BOP disalurkan setiap triwulan. Kedua jenis dana ini hanya dapat dicairkan apabila sekolah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban periode sebelumnya secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Dalam hal pengelolaan dana, pengalokasian dan manajemen pembiayaan dilakukan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Setiap kegiatan sekolah dirancang dengan perencanaan yang rinci dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Tidak diperkenankan adanya belanja “lain-lain” dalam penggunaan anggaran; setiap pengeluaran harus jelas tujuannya dan didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat kegiatan insidental yang belum tercantum dalam RKAS, sekolah dapat melakukan revisi atau pergeseran anggaran melalui mekanisme perubahan RKAS sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pembiayaan sekolah ini melibatkan seluruh elemen, baik kepala sekolah, guru, staf administrasi, komite sekolah, hingga perwakilan masyarakat. Keterlibatan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, rasa tanggung jawab bersama, serta partisipasi publik dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Untuk pengembangan kompetensi guru, dana dialokasikan dalam bentuk pelatihan, seminar, dan kegiatan pembinaan profesional. Namun, kesejahteraan guru tidak dapat dibebankan pada dana BOS dan BOP, karena sesuai aturan yang berlaku, dana tersebut tidak diperkenankan digunakan untuk honor atau insentif langsung bagi guru ASN.

Dalam praktiknya, dana juga dimanfaatkan untuk pemeliharaan dan peningkatan fasilitas sekolah, seperti renovasi ruang kelas, pembelian peralatan TIK, dan perbaikan laboratorium, yang dilakukan secara nyata dan berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan infrastruktur. Terkait dukungan terhadap peningkatan prestasi siswa, sekolah memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan akademik dan non-akademik, termasuk lomba OSN, ekstrakurikuler, pembinaan karakter, serta pelatihan kepemimpinan siswa. Seluruh kegiatan ini dirancang agar tidak membebani biaya kepada siswa, sehingga semua peserta didik dapat berpartisipasi tanpa hambatan finansial.

Efek dari implementasi anggaran yang tepat sasaran ini dapat dilihat dari meningkatnya motivasi belajar siswa dan semangat guru dalam mengajar. Meski guru belum menerima insentif langsung, mereka merasa didukung melalui tersedianya fasilitas belajar yang lebih memadai dan peluang untuk mengembangkan kompetensi secara profesional.

IMPLEMENTASI MANAJEMEN ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMA NEGERI 12 SEMARANG

3. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan (*Evaluation*) dalam Meningkatkan Mutu Sekolah di SMA Negeri 12 Semarang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pembiayaan pendidikan di sekolah berperan penting dalam menjamin keterlaksanaan program sekolah dan meningkatkan mutu pendidikan. Pada manajemen kelembagaan suatu sekolah, kegiatan evaluasi pembiayaan merupakan tahap akhir dari proses manajemen keuangan. Evaluasi atau auditing ini mencakup seluruh aktivitas pertanggungjawaban atas penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran dana oleh bendahara serta pihak lain yang terlibat.

Di SMA Negeri 12 Semarang, pengawasan pembiayaan dilakukan secara berlapis. Bendahara sekolah menyampaikan bahwa laporan keuangan dana BOP harus disusun dan dilaporkan setiap triwulan, sedangkan laporan BOS dilakukan dua kali dalam setahun. Laporan tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh KTU, kemudian ditandatangani oleh bendahara sekolah dan kepala sekolah sebelum dikirim ke Dinas Pendidikan. Bendahara sekolah menegaskan bahwa laporan keuangan yang lengkap dan tepat waktu, dana periode berikutnya tidak akan dicairkan. Ini menunjukkan bahwa pelaporan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pengawasan dan akuntabilitas sekolah.

Pelaksanaan pengawasan pembiayaan dilakukan dalam dua bentuk, yaitu audit internal dan eksternal. Audit internal dilaksanakan oleh bendahara sekolah bersama tim internal seperti komite sekolah dan Tim Penjamin Mutu Pendidikan (TPM). Evaluasi ini dilakukan minimal setiap semester, dan ditujukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan dan efektivitas anggaran yang digunakan. Audit eksternal dilakukan oleh Dinas Pendidikan atau lembaga seperti BPK dan BPKP, yang datang sewaktu-waktu untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan dan dokumen fisik keuangan sekolah. Dalam praktiknya, sekolah juga menyelenggarakan rapat pertanggungjawaban setiap akhir kegiatan, sebagai bentuk evaluasi internal dan pengambilan kebijakan untuk perencanaan anggaran berikutnya.

Pengawasan pembiayaan tidak hanya mencakup aspek pelaporan, tetapi juga menyentuh pada pengendalian kegiatan secara menyeluruh. Setiap kegiatan, baik oleh guru, tenaga administrasi, maupun siswa, wajib didukung oleh bukti fisik seperti

kuitansi dan berita acara. Hal ini diberlakukan untuk semua proses pencairan dana, termasuk pengeluaran oleh bendahara, guru, dan TU. Dengan begitu, sekolah memastikan bahwa semua penggunaan dana benar-benar sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Dalam hal dampaknya, pengawasan pembiayaan memberikan kontribusi besar terhadap mutu sekolah. Sekolah memanfaatkan dana BOS dan BOP untuk mendanai berbagai kegiatan peningkatan profesionalisme guru, seperti pelatihan, workshop, dan seminar, serta mendukung kegiatan pengembangan siswa seperti olimpiade, ekstrakurikuler, dan pelatihan kepemimpinan. Semua kegiatan tersebut dirancang agar tidak membebani siswa secara finansial. Bendahara sekolah menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan P5, seluruh biaya ditanggung oleh dana BOS tanpa meminta pungutan dari siswa, bahkan hingga pembelian alat dan perlengkapan praktik.

Berdasarkan keseluruhan praktik tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekolah menerapkan pengawasan pembiayaan secara konsisten dan sistematis. Evaluasi internal yang dilakukan oleh TPM serta audit eksternal dari dinas terkait menjadi instrumen penting untuk menjamin transparansi dan efektivitas penggunaan dana pendidikan. Hasil dari evaluasi tersebut juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan keuangan di periode selanjutnya, seperti penyesuaian alokasi dana berdasarkan hasil serapan dan kebutuhan program. Dengan demikian, pengawasan pembiayaan terbukti mampu meningkatkan mutu layanan pendidikan dan memperkuat tata kelola keuangan sekolah yang akuntabel dan berkelanjutan.

Pembahasan

1. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan keuangan dalam konteks pendidikan merupakan proses penyusunan anggaran yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dalam jangka waktu tertentu. Dalam menyusun biaya satuan pendidikan, dikenal dua pendekatan utama, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro mengacu pada jumlah total pengeluaran pendidikan dari berbagai sumber yang dibagi jumlah peserta didik, sedangkan pendekatan mikro berfokus pada perhitungan biaya berdasarkan

IMPLEMENTASI MANAJEMEN ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMA NEGERI 12 SEMARANG

komponen pendidikan yang digunakan langsung oleh peserta didik (Harbes et al., 2024). Manajemen keuangan pendidikan terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu perencanaan keuangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan ini, dalam bentuk penyusunan anggaran (*budgeting*), bertujuan untuk mengkoordinasikan seluruh sumber daya secara sistematis guna mencapai tujuan institusi tanpa menimbulkan dampak negatif. Pada tahap implementasi, pelaksanaan dilakukan berdasarkan rencana anggaran yang telah disusun dan memungkinkan adanya penyesuaian jika diperlukan. Tahap evaluasi berperan penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan (Rahmulyana et al., 2024).

2. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 12 Semarang, terdapat dua aktivitas utama yang menjadi tanggung jawab bendahara sekolah, yaitu proses penerimaan dan pengeluaran dana. Penerimaan dana mencakup masuknya anggaran dari sumber-sumber resmi seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari APBN, dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, pengeluaran dana merujuk pada implementasi anggaran untuk mendukung berbagai program sekolah yang telah dirancang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Pendidikan hanya akan berlangsung secara optimal apabila ditopang oleh berbagai komponen yang saling berhubungan, mulai dari tenaga pendidik yang berkualitas, lingkungan belajar yang kondusif, hingga sistem pembiayaan yang tertata rapi dan akuntabel. Oleh karena itu, SMA Negeri 12 Semarang berkomitmen menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik dan otoritas pengawas.

Dalam pelaksanaannya, dana BOS disalurkan dua kali dalam setahun, sedangkan BOP disalurkan setiap triwulan. Penyaluran kedua jenis dana tersebut baru dapat dicairkan setelah sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dari periode sebelumnya secara lengkap dan sesuai dengan regulasi. Hal ini sejalan dengan pendapat (Setiani & Sutomo, 2024) yang menyatakan bahwa sekolah wajib menggunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukan yang telah diatur, dan tidak diperbolehkan menyimpang dari ketentuan juknis yang berlaku. Penyimpangan

terhadap penggunaan dana berpotensi menimbulkan sanksi administratif maupun hukum. Pembiayaan pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan di sekolah dan prestasi belajar siswa. Dukungan finansial yang memadai dapat meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan (Widyaningrum & Riani, 2024).

Adapun dana yang dikelola oleh sekolah digunakan untuk berbagai kegiatan prioritas, seperti pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan seminar, pengadaan sarana pembelajaran, serta pembiayaan kegiatan siswa dalam ajang akademik dan non-akademik. Meskipun aturan BOS dan BOP tidak memperbolehkan penggunaannya untuk kesejahteraan guru secara langsung, namun pelaksanaan program pengembangan profesional telah memberikan dampak positif terhadap semangat mengajar para pendidik.

Secara khusus, SMA Negeri 12 Semarang juga telah mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana, seperti renovasi ruang kelas, pengadaan alat TIK, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya. Upaya ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Selain itu, program-program yang didanai dari BOS dan BOP juga diarahkan untuk mendorong prestasi siswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan seperti Olimpiade Sains Nasional (OSN), pelatihan kepemimpinan siswa, lomba ekstrakurikuler, dan pembinaan karakter. Semua kegiatan ini dirancang agar tidak membebani siswa secara finansial, sehingga menjamin inklusivitas dan partisipasi merata dari seluruh peserta didik.

Dengan sistem pengelolaan anggaran yang tertib dan partisipatif, motivasi belajar siswa meningkat dan kinerja guru lebih terfasilitasi, meski belum seluruh kebutuhan sekolah dapat tercover sepenuhnya oleh BOS dan BOP. Sekolah tetap melakukan revisi RKAS apabila muncul kebutuhan mendesak (*insidental*), sesuai mekanisme regulasi perubahan anggaran yang berlaku.

3. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan

Evaluasi dan pengawasan merupakan tahap akhir dalam manajemen keuangan pendidikan yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan program

IMPLEMENTASI MANAJEMEN ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMA NEGERI 12 SEMARANG

keuangan. Evaluasi ini penting untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dan rencana awal serta mengidentifikasi hambatan atau potensi risiko ke depan. Penelitian oleh (Panca & Zakaria, 2021) menunjukkan bahwa pengawasan keuangan di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan dilakukan melalui perencanaan yang matang, pelaporan yang transparan, dan keterlibatan aktif kepala sekolah serta komite dalam proses evaluasi. Selain itu, (Merisa & Safitri, 2023) menekankan bahwa pengawasan dana pendidikan yang efektif dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan sekolah, sehingga mendukung peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Selanjutnya audit merupakan tahap akhir dalam manajemen keuangan pendidikan yang penting untuk menjamin akuntabilitas dan keabsahan laporan keuangan. Proses ini mencakup pemeriksaan transaksi oleh bendahara dan pihak berwenang untuk memastikan kesesuaian dengan prosedur. Audit internal yang dilakukan secara berkala terbukti meningkatkan kualitas pelaporan dan memberikan rekomendasi perbaikan (Rakhmawati, 2023). Selain itu, audit juga membantu memastikan kegiatan keuangan berjalan sesuai aturan dan mendukung transparansi (Heka Herawati et al., 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan di SMA Negeri 12 Semarang berperan signifikan dalam meningkatkan mutu sekolah, khususnya melalui penguatan kompetensi guru, pengadaan fasilitas yang memadai, serta peningkatan prestasi siswa. Proses perencanaan anggaran dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan disusun dalam dokumen RKAS yang transparan dan terukur. Hal ini memastikan bahwa setiap program yang dibiayai memiliki relevansi langsung terhadap kebutuhan operasional sekolah dan tujuan pendidikan.

Pelaksanaan pembiayaan dijalankan dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Dana BOS dan BOP digunakan secara proporsional untuk kegiatan prioritas seperti pelatihan guru, pembinaan karakter siswa, dan peningkatan fasilitas belajar, tanpa membebani peserta didik. Di sisi lain, pengawasan dan evaluasi dilaksanakan melalui

audit internal dan eksternal yang ketat, serta pelaporan rutin yang menjadi syarat pencairan dana periode berikutnya. Mekanisme ini mampu menjamin keterbukaan dan keberlanjutan pengelolaan anggaran di sekolah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan manajemen anggaran tidak hanya ditentukan oleh jumlah dana yang tersedia, tetapi juga oleh kualitas sistem pengelolaan dan komitmen aktor-aktor di dalamnya. Kolaborasi antara kepala sekolah, bendahara, guru, komite, dan orang tua menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang profesional, efektif, dan berorientasi pada mutu. Dengan manajemen pembiayaan yang tertib dan berintegritas, SMA Negeri 12 Semarang berhasil menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas serta memperkuat peran sekolah sebagai agen transformasi pendidikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau mixed-methods untuk mengukur secara lebih akurat hubungan antara manajemen pembiayaan dan capaian mutu pendidikan. Selain itu, perluasan lokasi penelitian ke sekolah dengan kondisi geografis dan sosial ekonomi yang berbeda akan memberikan gambaran yang lebih luas tentang efektivitas manajemen anggaran pendidikan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Arnita Niroha Halawa, & Dety Mulyanti. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Kualitas Mutu Instansi Pendidikan Dan Pembelajaran. *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2), 57–64. <https://doi.org/10.58192/insdun.v2i2.757>
- Eminarni, F. A., Lestari, W., Prasetyaningrum, E., & Nurkolis. (2025). Implementasi Fungsi Manajemen Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *JANACITA: Journal of Primary and Children's Education*, 8(1), 11–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35473/janacitta.v8i1.3833>
- Fatma Sari, Iswantir M, & Susanda Febriani. (2024). Implementasi Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di SMAN

IMPLEMENTASI MANAJEMEN ANGGARAN PENDIDIKAN DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMA NEGERI 12 SEMARANG

- 5 Payakumbuh. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(1), 322–331.
<https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i1.1306>
- Harbes, B., Karim, H. A., Sesmiarni, Z., Arnedo, M., & Salsabila, S. (2024). Perencanaan Pendidikan dan Manajemen Pembiayaan (Mewujudkan Peningkatan Mutu Secara Berkelanjutan). *Al-Marsus: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2).
<https://doi.org/10.30983/10.30983/al-marsus.v2i2.8860>
- Heka Herawati, Adinda Maudia Savira, & Kiki Adilianti. (2024). Peran Auditor Internal Dalam Pendanaan Dukungan Operasi Sekolah (Bos). *Inspirasi Dunia: Jurnal Riset Pendidikan Dan Bahasa*, 3(3), 183–190.
<https://doi.org/10.58192/insdun.v3i3.2264>
- Imanika, M. S., Nisa, R., Prasetya, G. A., & Mubarok, A. W. (2024). Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) (Studi Kasus di Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Karya Parigi). *Jurnal Pelita Nusantara: Kajian Ilmu Sosial Muldisiplin*, 2(2), 189–194.
<https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v2i2.575>
- Indrawati, E., Mulyati, & Miftakodin, Drs. (2019). *Pengelolaan Keuangan Sekolah (MPPKS-KEU)*. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- Kadariah, K., Kusmaladewi, K., & Hasmiah, H. (2020). Faktor Kesulitan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar Di Ditinjau Dari Penggunaan Kurikulum, Struktur Materi, Sarana Dan Prasarana, Dan Alokasi Waktu. *JEKPEND: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 3(2), 15. <https://doi.org/10.26858/jekpend.v3i2.14410>
- Kemenkeu. (2023). *RAPBN Tahun Anggaran 2024 : Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*.
- Lukmonowati, Y., Samanto, H., & Pravasanti, Y. A. (2024). Pengaruh Dana BOS, Dana BOP Pendidikan dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X pada SMK Negeri 1 Mojosongo. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 3(3), 551–558. <https://doi.org/10.53088/jikab.v3i3.86> ISSN:
- Machali, I. (2022). Sistem Manajemen Mutu Pendidikan: Mengenal Manajemen Mutu ISO dalam Pendidikan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*.
<https://ejournal.stkippacitan.ac.id/ojs3/index.php/jpp/article/view/20>

- Mafazi, R. T., & Ahmad, M. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(6), 232–240. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i6.2860>
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset.
- Merisa, N., & Safitri, B. (2023). Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan di Sekolah. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 81–88. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.218>
- Muchamad Zainal Muttaqin, Ratnaningsi, S., & Purwanto, I. (2023). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MTs Ummul Quro Al-Islami Bogor. *Tadbir Muwahhid*, 7(2), 249–261. <https://doi.org/10.30997/jtm.v7i2.9478>
- Mufid, A., Miyono, N., & Sumarno. (2025). Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Sekolah SD Negeri Klepu 03 Pringapus Kabupaten Semarang. *Cendekiawan*, 7(1), 55–65. <https://doi.org/10.35438/cendekiawan.v7i1.546>
- Munawwarah, & Zubaidah. (2025). Program Bantuan Pemerintah dalam Pengelolaan Biaya Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal Scientific of Mandalika*, 6(2), 282–290. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss2pp282-290>
- Na'im, Z. (2023). Menciptakan Pembiayaan Pendidikan Sekolah/Madrasah Secara Mandiri Dalam Bingkai Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. *Leadership: Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 139–154. <https://doi.org/10.32478/leadership.v4i2.1754>
- Nurhattati, & Ripki, A. J. H. (2021). Teacher Participation in Determining Activity Plan and Budget in Private Ibtidaiyah Madrasah. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 19(3), 286–302. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i3.1072>
- Panca, S., & Zakaria, Z. (2021). Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan Sekolah (Studi Deskriptif Kualitatif di SMA Negeri 2 Bengkulu Selatan). *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 15(2), 39–42. <https://doi.org/10.33369/mapen.v15i2.17270>

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN ANGGARAN PENDIDIKAN
DALAM MENINGKATKAN MUTU SEKOLAH DI SMA NEGERI
12 SEMARANG**

- Rahayuningsih, S. (2020). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(2), 110–117. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i2.10128>
- Rahmulyana, A., Yusuf, F. A., Hayadi, B. H., Yustiva, F., Junaesih, R., & Raman. (2024). *Perencanaan Strategis Manajemen Keuangan untuk Sukses Pendidikan di SDN Kampung Baru*. 4(1), 22–30. <https://doi.org/10.53067/ijebef>
- Rakhma, M. (2022). Pengaruh Pengelolaan Dana BOPDA Terhadap Mutu dan Kepuasan Kepala Madrasah Diniyah di Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. *Jurnal Kependidikan Islam*, 12(2), 182–196. <https://doi.org/10.15642/jkpi.2022.12.2.182-196>
- Rakhmawati, S. Y. (2023). Hubungan Antara Audit Internal Dan Kualitas Laporan Keuangan Di SMKN 1 Surabaya. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 2(2), 168–176. <https://doi.org/10.30640/dewantara.v2i2.1034>
- Ramdiansyah, & Karo-karo, S. (2024). Partisipasi Guru dalam Penyusunan Anggaran Pengaruhnya terhadap Kinerja Anggaran Sekolah Sekolah. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(10), 890–901. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i10.5310>
- Refnawati, Yovica, A., Octavia, L. F., & Rahmi, S. (2024). Analisis Sistem dan Kebijakan Pendidikan Islam Tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(5), 6438–6447. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5j5.2010>
- Setiani, R., & Sutomo, I. (2024). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri 1 Bentok Darat Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. *Kindai*, 20(1), 001–017. <https://doi.org/10.35972/kindai.v20i1.1473>
- Sjioen, A. E., & Ludji, S. R. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang. *Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen*, 2(3), 12–18. <https://doi.org/10.32938/jie.v2i3.732>
- Sofyan, Y., Marsanto, Ahmadi, E., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Pembiayaan Pendidikan (Suatu Kajian Praktis Dalam Pengelolaan Anggaran Pendidikan di Sekolah Menengah Umum). *JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(1), 221–239. <https://doi.org/10.31955/mea.v5i1.791>

- Sumiati, & Ahmad, A. (2021). Pengendalian Mutu Pendidikan: Konsep dan Aplikasi. *IQRA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 43–50. <https://doi.org/10.17509/jap.v13i1.6384>
- Supriadi, A., & Pratiwi, S. N. (2024). Efektivitas Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Standar Mutu Pendidikan Di SMP Negeri 1 Singkohor Aceh Singkil. *Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah Dan Tinggi (JMP-DMT)*, 5(3), 321–329. <https://doi.org/10.30596/jmp-dmt.v5i3.20702>
- Suryaman, M., & Trisnawati, A. (2025). Kajian Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dasar: Strategi, Tantangan, dan Implikasinya Terhadap Mutu Sekolah. *Jurnal Tahsinia*, 6(4), 560–573. <https://doi.org/10.57171/jt.v6i4.657>
- Triwiyanto, T., & Kusumaningrum, D. E. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Sistem Manajemen Pendidikan terhadap Mutu Sekolah Dasar di Kota Malang. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 9(1), 35–46. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v9i1.4929>
- Widyaningrum, D., & Riani, L. P. (2024). *Peran Pembiayaan Pendidikan Pada Kualitas Pendidikan Sekolah Dan Prestasi Belajar Siswa : Sebuah Tinjauan Pustaka*. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/PROSPEK>